

LKJ 2021



Pemerintah Kabupaten Soppeng
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
(BPKPD)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021





Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata, akhirnya penyusunan bahan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKj), bahwa Perjanjian Kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, dan kegiatan yang didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya Aspek keuangan.

Disamping itu, bahan Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait karena berbagai kekurangan, oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

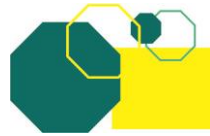
Watansoppeng, 29 Maret 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**

Drs. H. DIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Secara ringkas, capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks	8.49	11.52	135.68%
		Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks	20	20	100%
		Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks	13.91	14.72	105.82%
		Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks	15	10	66.67%
		Indeks Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5)	Indeks	3.68	*3,23	87.77%
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks	15	* 15	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	1 %	2%	200%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng	Predikat	BAIK	BAIK	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	Persentase	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase	77-79	84,44	106.89%

*Nilai Realisasi merupakan nilai pengukuran IPKD tahun 2020



Daftar Isi

Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel/Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Komposisi Sumber Daya Manusia Organisasi.....	6
F. Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2021	20
C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	22
D. Rencana Anggaran Berdasarkan Sasaran Tahun 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	32
B. Akuntabilitas Keuangan	71
C. Rata-Rata Capaian sasaran	71
D. Reward and Punishment.....	72
BAB IV PENUTUP	73
LAMPIRAN	



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan	9
Tabel 2.1	Tujuan Renstra Strategik SKPD	16
Tabel 2.2	Sasaran Rencana Strategik SKPD	17
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran I	18
Tabel 2.4	Program untuk Pencapaian Sasaran II	19
Tabel 2.5	Program untuk Pencapaian Sasaran III	19
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 2.8	Target Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2021	24
Tabel 2.9	alokasi Anggaran Belanja Persasaran pada APBD Perubahan Tahun 2021	24
Tabel 2.10	Rencana Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan Sasaran I Tahun 2021	25
Tabel 2.11	Rencana Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan Sasaran II Tahun 2021.....	28
Tabel 2.12	Rencana Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan Sasaran III Tahun 2021	29
Tabel 2.13	Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021	31
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran I Tahun 2021	34
Tabel 3.3	Pengukuran Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	36
Tabel 3.4	Pengukuran Dimensi Transparansi	38
Tabel 3.5	Pengukuran Dimensi Penyerapan Anggaran	40
Tabel 3.6	Pengukuran Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	42
Tabel 3.7	Pengukuran Dimensi Opini BPK.....	42
Tabel 3.8	Perbandingan Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya	43
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Renstra	45
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran I	47
Tabel 3.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I	50
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran II Tahun 2021	51
Tabel 3.13	Pengukuran Persentase Pendapatan Asli Daerah	52



Tabel 3.14	Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah	53
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Tahun ini dan Tahun sebelumnya	54
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Renstra.....	55
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan Sasaran II	58
Tabel 3.18	Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran II	59
Tabel 3.19	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran III Tahun 2021.....	60
Tabel 3.20	Pengukuran Persentase Pendapatan Asli Daerah	61
Tabel 3.21	Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	62
Tabel 3.22	Perbandingan Kinerja Sasaran III tahun ini dan tahun sebelumnya ..	63
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran III dengan target Renstra	64
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran III.....	66
Tabel 3.25	Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sasaran III	68
Tabel 3.26	Rata-Rata Capaian Sasaran Rencana Strategik	69

Daftar Bagan

Bagan 1. 1	Struktur Organisasi Sekretariat BPKPD
------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang berdampak di seluruh lini kehidupan termasuk lingkungan Pemerintahan khususnya Pemerintah Kabupaten Soppeng. Hal ini mengakibatkan pengalihan sebagian anggaran APBD untuk menanggulangi dampak pandemi.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja (LKj) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.



Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kab. Soppeng dimaksudkan : sebagai dokumen laporan hasil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja terhadap indikator sasaran organisasi selama tahun anggaran 2021.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Soppeng adalah : untuk memberikan laporan yang jelas sebagai bentuk pencapaian kinerja sasaran selama Tahun Anggaran 2021, dan menjadi arah bagi perencanaan tahun anggaran berikutnya dalam menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 83) maka Badan Pengelolaan



Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Soppeng peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, sangat vital sekali yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Soppeng.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng No. 83 Tahun 2021 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang Retribusi Daerah;
3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Sekretariat;
4. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang Anggaran;
5. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
6. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang Akuntansi;



7. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang Aset;

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dipimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:

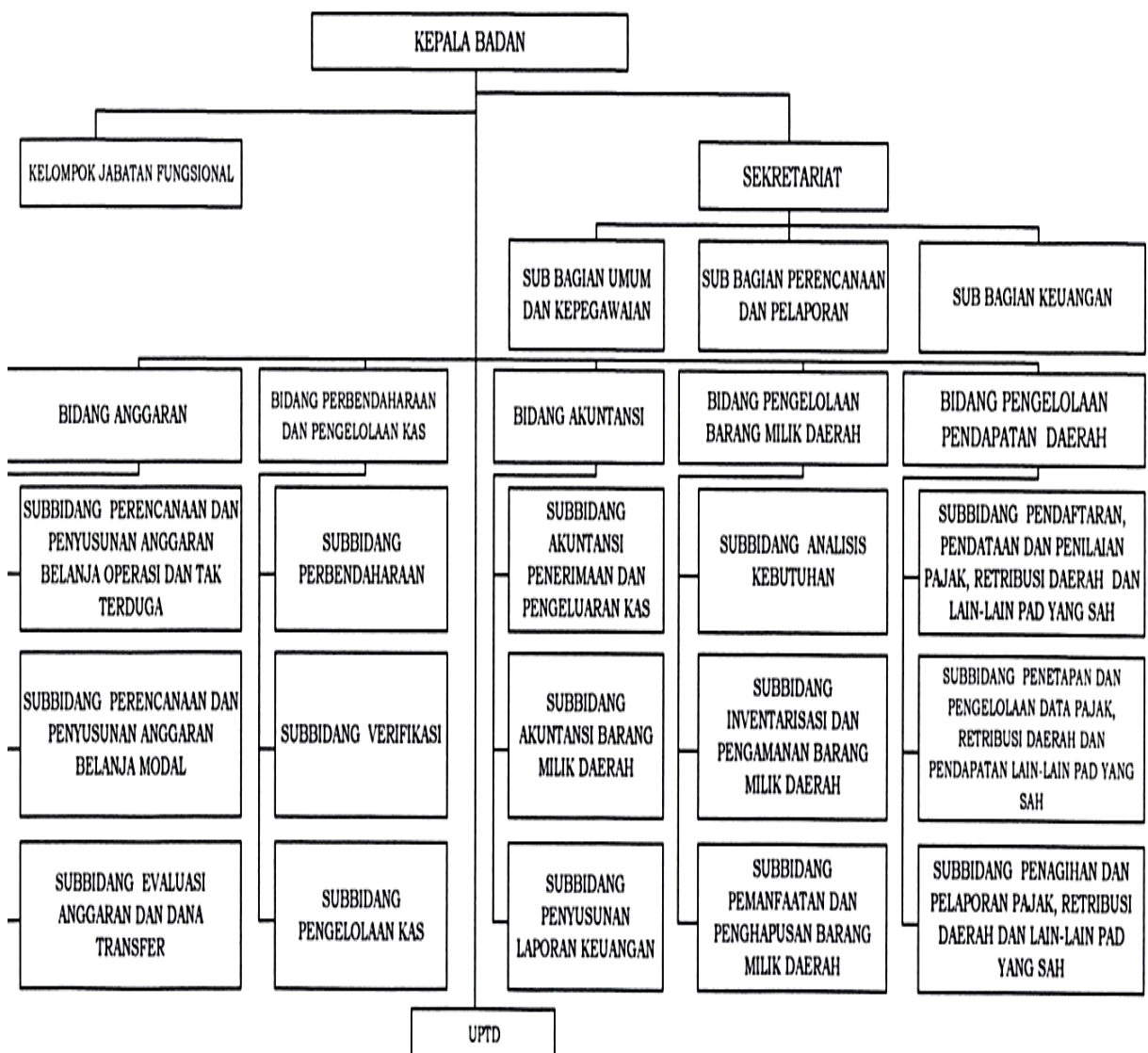
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pendapatan pengelolaan daerah;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya



D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 83). Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021





E. Komposisi Sumber Daya Manusia Organisasi

1. Pendidikan

Sebagai SKPD penyelenggara urusan di bidang pengelolaan keuangan, Penyelenggara urusan wajib ini memiliki pegawai sebanyak 100 (Seratus) orang dengan kualifikasi latar belakang pendidikan sebagai berikut:

- Sarjana S2 (Master)	=	32 orang
- Sarjana S1	=	55 orang
- Sarjana Muda (D III)	=	2 orang
- SLTA	=	10 orang
- SLTP	=	1 orang

Dukungan Sarana dan Prasarana

Sumberdaya lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan, berupa dukungan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan gedung kantor
2. Alat-alat angkutan darat bermotor baik beroda empat maupun beroda dua
3. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa : AC, Komputer/PC & Laptop, Printer, Loker PBB, dll
4. Peralatan kantor meubelair berupa : Meja kerja, Kursi kerja dan Lemari
5. Peralatan Penunjang Lainnya

2. Berdasarkan Jabatan Struktual

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng No. 43 Tahun 2020 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Pejabat Struktural yakni :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan



3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal
 - c. Sub Bidang dan Evaluasi Dana Transfer
4. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Verifikasi
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Kas
5. Bidang Akuntansi
 - a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - b. Sub Bidang Akuntansi dan Barang Milik Daerah
 - c. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan
 - b. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - c. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
 - c. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

3. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng No. 43 Tahun 2020 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Maka Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh



Pegawai Fungsional/Pejabat Pelaksana sebanyak 70 orang pegawai. Jabatan pelaksana tersebut terdiri dari :

- a. Pengadministrasian Umum 1 orang
- b. Pengelola Kepegawaian 2 orang
- c. Pengeleola BMN 2 orang
- d. Analisis Data dan Informasi 2 orang
- e. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 orang
- f. Bendahara 5 orang
- g. Pengelola Keuangan 5 orang
- h. Analisis Pajak dan Retribusi Daerah 3 orang
- i. Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi 2 orang
- j. Analisis Pendapatan Daerah 1 orang
- k. Pengelola Sumber Pedapatan Asli Daerah 1 orang
- l. Analisis Penagihan Pajak 1 orang
- m. Pengelola Penagihan dan Pengawasan 1 orang
- n. Analisis Perencanaan Anggaran 2 orang
- o. Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1 orang
- p. Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 1 orang
- q. Analisis Perbendaharaan 5 orang
- r. Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan 3 orang
- s. Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 3 orang
- t. Analisis Transaksi Keuangan 3 orang
- u. Pengolah Data Laporan Kas 1 orang
- v. Analisis Laporan Neraca 3 orang
- w. Penata Laporan Keuangan 1 orang
- x. Analisis Laporan Keuangan 1 orang
- y. Analisis BMN 2 orang
- z. Penyusun kenutuhan Barang Inventaris 1 orang
- aa. Analisis Klasifikasi Barang 1 orang
- bb. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul penghapusan Barang 2 orang
- cc. Pengelola Pajak Daerah 9 orang
- dd. Pengelola Retribusi Daerah 4 orang



ee. Pejabat Pelaksana lainnya 8 orang

4. Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Sebagai SKPD penyelenggara urusan di bidang pengelolaan keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki pegawai dengan jenjang kepangkatan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Gol.	Pangkat	Jumlah
1	IV/c	Pembina Utama Madya	1
2	IV/a	Pembina Tk. I	5
Total Gol IV			6
3	III/d	Penata Tk. I	17
4	III/c	Penata	15
5	III/b	Penata Muda Tk. I	40
6	III/a	Penata Muda	16
Total Gol III			88
7	II/d	Pengatur Tk. I	1
8	II/c	Pengatur	3
9	II/b	Pengatur Muda Tk. I	1
10	II/a	Pengatur Muda	0
Total Gol II			5
11	I/d	Juru Tk. I	1
12	I/c	Juru	0
13	I/b	Juru Muda Tk. I	0
14	I/a	Juru Muda	0
Total Gol I			1
Jumlah			100
			100%



5. Permasalahan dan Isu Strategis

Pelaksanaan kinerja Pemerintah senantiasa mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang dinamis serta selalu mencermati kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang berkelanjutan sengan tujuan tercapainya peningkatan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah demi terwujud Good dan Clean Governance.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi antara lain :

1. Penyesuaian terhadap regulasi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2. Adanya aplikasi SIPD oleh Kemendagri yang belum bisa diakses dan diterapkan secara menyeluruh
3. Ketepatan waktu penyusunan tahapan Penganggaran Pemerintah
4. Kepatuhan terhadap Rencana Anggaran Kas SKPD
5. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
6. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
7. Data Wajib Pajak Daerah belum selalu update dan status Obyek Pajak sering berubah.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
9. Penagihan piutang pajak perlu ditingkatkan.
10. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
11. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
12. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan.
13. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.



Analisis lingkungan strategis sangat penting bagi suatu organisasi karena organisasi tidak terlepas hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan internal, maupun lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal mencakup analisis di dalam organisasi baik mengenai sumberdaya, kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki organisasi. Analisis lingkungan eksternal mencakup analisis di luar organisasi baik yang memiliki implikasi langsung terhadap pengaturan atau operasional organisasi, maupun yang tidak memiliki implikasi langsung. Agar Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka perlu merespon, memanfaatkan dan menghadapi tantangan dan peluang yang ada secara efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan upaya menemukan, memanfaatkan dan mengelola kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi.

Analisis lingkungan internal akan memberi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal akan memberi gambaran tentang peluang dan ancaman. Metode yang digunakan dalam menganalisis lingkungan strategis ini adalah metode analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats).

a. Lingkungan Internal

1) Kekuatan

- a) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- b) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
- c) Adanya teknologi informasi di bidang keuangan dengan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- d) Tersedianya manajemen keuangan berbasis akrual
- e) Adanya Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam penetausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah



- f) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan adanya integrasi e-planning dan e-budgetting
 - g) Suasana lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja
 - h) SDM yang berkompeten
 - i) Prosedur kerja / pedoman tata kerja yang jelas dan baik
 - j) Tersedianya sumber dana kegiatan
 - k) Bimbingan berkontinuitas kepada aparat
- 2) Kelemahan
- a) Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah SILPA menjadi signifikan
 - b) Belum seimbangnya antara jumlah aparat dengan volume kerja;
 - c) Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik
 - d) Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah
 - e) Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan sistem Akuntansi Pemerintah
- b. Lingkungan Eksternal
- 1) Peluang
 - a. Adanya peran masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran Pajak dan Retribusi daerah
 - b. Otonomi daerah yang memberi kewenangan cukup untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah
 - c. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan SDM
 - d. Adanya kerjasama antara Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan daerah dengan stakeholder lainnya.



- e. Adanya kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,
- f. Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan daerah.
- g. Adanya dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah

2) Ancaman dan Tantangan

- a. Krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan termasuk perubahannya yang sulit diprediksi
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat
- c. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah
- d. Keterbatasan sumber dana pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung seluruh program pembangunan.
- e. Penilaian masyarakat terhadap perilaku aparatur

F. Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja

Salah satu inovasi yang dikembangkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021 antara lain :

1. SEPEKAN (Sedekah Pendidikan)

Merupakan program sedekah Pendidikan, yang bertujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan cara menekan angka putus sekolah yang diakibatkan karena kurang mampu. Melalui program ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng bekerjasama dengan Sekoah Tinggi Ilmu Ekonomi Lamappapoleonro Soppeng telah berhasil membiayai Pendidikan 2 (dua) orang mahasiswa kurang mampu an. Sri Rahmayani dan Asriyanto. Pembiayaan tersebut termasuk pembayaran BPP, SPP, uang Ujian maupun biaya transport. Dana dalam program SEPEKAN ini diperoleh dari sedekah ASN dan Non ASN lingkup BPKPD Kab. Soppeng, serta pihak lain yang ingin berkontribusi dalam Sedekah Pendidikan.



2. PayPajak Online (e-mobile system)

Cara bayar pajak online ternyata memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak. Selain menghemat waktu, cara modern tersebut juga sangat mudah untuk dilakukan, Prosedur yang harus dilewati wajib pajak untuk membayar pajak jadi lebih ringkas.

Jadi, wajib pajak tidak perlu keluar dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya bahkan tidak perlu mendatangi bank/kantor pos persepsi dan menyetorkan pajak secara langsung.

Didukung oleh berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, debit ATM/Bank, Internet Banking, pembayaran instan, Virtual Account dan OVO hingga di gerai atau minimarket terdekat di lingkungan tempat tinggal, pembayaran PBB setiap tahunnya bisa dilakukan dengan lebih mudah, praktis dan dapat menjadi solusi pembayaran yang sah. Program pay pajak online Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab, Soppeng dalam hal ini bekerjasama dengan Bank SulSelBar Cabang Soppeng dan Kantor Pos.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi Renstra

Dengan memperhatikan latar belakang dan kondisi Kabupaten Soppeng dan lingkungan strategis yang ada dalam menghadapi era globalisasi, maka perubahan dinamika yang terjadi perlu direspon dan disikapi dengan kebijakan yang cepat dan tepat agar pemerintah lebih mampu mengakomodasi tekanan-tekanan dan perubahan orientasi masyarakat, artinya penyelenggara pemerintah harus diarahkan pada optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yakni pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Soppeng menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, adalah

“Pemerintahan yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”

Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, adalah :

1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
5. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rancana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, program dan target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.



Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan Rencana Strategik SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target (Tahun)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (6 Dimensi Keuangan Daerah)	76.08	76.13	76.19	76.24	76.30	76.35
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP BPKPD	63.77 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)	70 (BB)	71 (BB)

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan ditetapkan.



Tabel. 2.2

Sasaran Rencana Strategik SKPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target (Tahun)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	8.49	8.52	8.55	8.58	8.61	8.64
	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96
	Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Indeks Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5)	3.68	3.69	3.71	3.72	3.74	3.75
	Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
Meningkatnya kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	77-79	79-81	81-83	83-85	85-87	87-90

4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari



pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Perencanaan Kinerja tahun 2021 dengan indikator kinerja dan target kinerja melalui kegiatan, dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Program untuk Pencapaian Sasaran I

Sasaran Strategik	Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	➤ Indeks Keseuaian dokumen perencanaan dan penganggaran ➤ Indeks pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	1. Program Pengelolaan keuangan Daerah	122.542.396.619
	➤ Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah ➤ Indeks penyerapan anggaran ➤ Indeks kondisi keuangan daerah ➤ Indeks opini BPK terhadap LKPD	2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	1.120.135.000
JUMLAH ANGGARAN			123.662.531.619

Berdasarkan tabel diatas maka untuk sasaran strategik "Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah" untuk tahun 2021 didukung dengan 2 (dua) program dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 123.662.531.619.



Tabel.2.4
Program untuk Pencapaian Sasaran II

Sasaran Strategik	Indikator Sasaran	Program kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Pendapatan Daerah	➤ Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ➤ Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.597.854.497
JUMLAH			1.597.854.497

Berdasarkan tabel diatas maka untuk sasaran strategik "Meningkatnya Pendapatan Daerah" untuk tahun 2021 didukung dengan 1 (satu) program dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.597.854.497,-

Tabel 2.5
Program untuk Pencapaian Sasaran III

Sasaran Strategik	Indikator Sasaran	Program kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	➤ Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK ➤ Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.258.687.302
JUMLAH			20.258.687.302



Berdasarkan tabel diatas maka untuk sasaran strategik ” Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng” untuk tahun 2021 didukung dengan 1 (satu) program dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.20.258.687.302,-

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2021

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2021 (sebagaimana terlampir)

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.
2. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana strategis.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.



Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Dokumen Pengesahan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021			
No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran	8.49
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	13.91
		Indeks Penyerapan Anggaran	15
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	3.68
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD	15
2.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 %
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	BAIK
3.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	77-79

Program	Anggaran
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 122.542.396.619
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.120.135.000
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.597.854.497
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20,258,687,302

Watansoppeng, 8 Oktober 2021

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK, SE



KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



Drs. H. DIHA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19680102199603100





Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.7

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Mewujudkan system pengelolaan keuangan, pendapatan dan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (6 Dimensi Keuangan Daerah)	Indeks (I)	Indeks D1 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)	Jumlah D1+D2+D3+D4+D5+D6
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks (I)	Indeks D1 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)	Diukur oleh Pemerintah Tingkat Provinsi melalui Aplikasi IPKD Kemendagri
	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks (I)	Indeks D2 = Skor Rata-Rata x Bobot (20)	
	Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks (I)	Indeks D3 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)	
	Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks (I)	Indeks D4 = Skor Rata-Rata x Bobot (20)	
	Indeks Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5)	Indeks (I)	Indeks D5 = Skor IKK x Bobot (15)	
	Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks (I)	Indeks D6 = Skor x Bobot (15)	



TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	Jumlah Realisasi PAD(n) - Jumlah Realisasi PAD(n-1) / Jumlah Realisasi PAD (n-1) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021 dan 2020
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng	BAIK	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Nilai SAKIP BPKPD	Nilai	Nilai SAKIP BPKPD (tahun n-1)	Catatan Hasil Reviu Inspektorat tahun 2021
Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	Persentase	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK/ Jumlah Aparatur pada BPKPD x 100%	Rekap SKP oleh Subag Umum dan Kepegawaian
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Indeks (I)	Survey Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Survey Kepuasan Masyarakat

Pencapaian kinerja tersebut di atas didukung anggaran sebesar **Rp.145.519.073.418,- (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).**



D. Rencana Anggaran Berdasarkan Sasaran Tahun Anggaran 2021

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2021, melaksanakan 4 (empat) program yang dilaksanakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis. Rencana Kerja yang dituangkan dan disahkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Bupati Soppeng yang terpilih yaitu **“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik”**.

Tabel 2.8

Target Belanja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021

Uraian	Target (Rp.)	Persentase (Rp.)
Belanja Operasi	27.051.740.775	18,58
Belanja Modal	881.400.000	0,60
Belanja Tidak Terduga	2.113.580.939	1,45
Belanja Transfer	115.472.351.704	79,35
JUMLAH BELANJA	145.519.073.418	100

Tabel 2.9

Alokasi Anggaran Belanja persasaran pada APBD Perubahan TA. 2021

Uraian	Target (Rp.)	Persentase (Rp.)
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan	123.662.531.619	84,98
Meningkatnya Pendapatan Daerah	1.597.854.497	1,09
Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	20,258,687,302	13,92
JUMLAH BELANJA	145.519.073.418	100



Dari tabel diatas persentase terbesar diperuntukkan untuk mendukung sasaran I Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dengan total persentase dukungan anggaran sebesar 84,98%, kemudian Sasaran II sasaran Meningkatnya Pendapatan daerah sebesar 1.09%, dan dukungan untuk sasaran III Meningkatnya kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebesar 13.92%.

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsinya Adapaun rincian anggaran pencapaian sasaran untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Rencana Anggaran Program Kegiatan Sasaran I Tahun 2021

Sasaran Strategik	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	122.542.396.619
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	1.138.220.000
	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	21.450.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	27.290.000
	3. Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	34 Dokumen	36.225.000
	4. Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	34 Dokumen	36.225.000
	5. Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	34 Dokumen	3.875.000
	6. Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34 Dokumen	5.255.000
	7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Rancangan	512.350.000
	8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	2 Rancangan	482.750.000



Sasaran Strategik	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
	9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 SBU	12.800.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	100%	130.054.500
	1. Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	18.533.000
	2. Penyiapan, pelaksanaan Pengendalian dan penerbitan Anggaran kas dan SPD	4 Dokumen	16.860.000
	3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	9 SKPD	15.950.000
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6 Laporan	23.290.000
	5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Berita Acara	23.255.000
	6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	32.166.500
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		283.175.000
	1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	18.400.000
	2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	34 Dokumen	43.125.000



Sasaran Strategik	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
	LO dan Beban		
	3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	612 Dokumen	24.325.000
	4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	113.350.000
	5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Rancangan	40.175.000
	6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Kali dan 100%	43.800.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	120.990.947.119
	1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	100%	1,471,926,699
	2. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100%	1.933.087.777
	3. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	112.897.797.112
	4. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	2.113.580.939
	5. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	2.574.554.592
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	1.120.135.000



Sasaran Strategik	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.120.135.000
	1. Penyusunan Standar Harga	2 Dokumen	256.650.000
	2. Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Aset Pemda dan 100%	365.570.000
	3. Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	104.800.000
	4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	70.115.000
	5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 dokumen	323.000.000

Tabel 2.11

Rencana Anggaran Program Kegiatan Sasaran II Tahun 2021

Sasaran Strategik	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100%	1.597.854.497
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1.597.854.497
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	8 Kecamatan 20,3 M	395.849.497
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1 Dokumen	69.000.000
	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Jenis	279.500.000
	4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Dokumen	369.975.000
	5. Penagihan Pajak Daerah	203000 lembar SPPT	436.580.000



Sasaran Strategik	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
	6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen dan 8 Kecamatan	46.200.000
	7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	750.000

Tabel 2.12

Rencana Anggaran Program Kegiatan Sasaran III Tahun 2020

Sasaran Strategik	Program kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	20.258.687.302
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	45.860.000
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.795.900
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.955.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	13.310.000
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	11.800.000
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100%	10.972.957.440
	5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	10.851.654.440
	6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 SPM	107.840.000
	7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	13.463.000



Sasaran Strategik	Program kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	11.028.828
	8. Perencanaan Pengelolaan retribusi Daerah	2 Obyek Retribusi	11.028.828
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	39.200.000
	9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	39.200.000
	10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	15.523.500
	11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	202.710.000
	12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	335.632.500
	13. Penyediaan Bahan/Material	2 Paket	288.699.370
	14. Fasilitas Kunjungan Tamu	600 Orang	24.925.000
	15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 kali	447.218.600
	16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	150.000.000
	17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	335.400.000
	18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86 kali	10.000.000
	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	36 kali	6.567.192.394
	20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Jenis	519.800.000
	21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dina's atau Kendaraan Dina's	296 unit	167.013.670
	22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 kali	12.150.000



Sasaran Strategik	Program kegiatan	Target Fisik	Anggaran (Rp.)
	23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320 M2	110.946.000

Tabel 2.13
Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Uraian	Target (Rp.)	Persentase (%)
Pajak Daerah	20.900.595.200	47,45
Retribusi Daerah	1.247.100.000	2,83
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.396.001.683	41,76
Lain-Lain PAD yang sah	3.500.000.000	7,94
JUMLAH PAD	44.043.696.883	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini ada 2 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Capaian Kinerja (PCK);
2. Akuntabilitas Keuangan (AK);

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Laporan kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu evaluasi terhadap kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/Kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Untuk skala penilaian terhadap kinerja Pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Analisis Capaian Kinerja Organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :



SASARAN I

MENINGKATNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama dan membandingkan antara target dan realisasi.

Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah** menunjukkan capaian sebesar 92,40% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi beberapa kinerja yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks (I)	8.49	11.52	135.68%
		Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks (I)	20	20	100%
		Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks (I)	13.91	14.72	105.82
		Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks (I)	15	10	66.67%
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	Indeks (I)	3.68	*3,23	87.77
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks (I)	15	*15	100%
	Rata-rata Capaian					99,32%

*Nilai Realisasi merupakan nilai pengukuran IPKD tahun 2020

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.



Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Pencapaian atas target pada Sasaran I ini menunjukkan bahwa tata Kelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng cukup baik dibandingkan daerah lain di Sulawesi selatan. Untuk tingkat Kapasitas Keuangan Daerah dimana Kabupaten Soppeng masih termasuk pada klaster sangat rendah, ternyata cukup mampu untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan Nilai IPKD tahun 2020 Kabupaten Soppeng menduduki Peringkat tertinggi dengan Total IPKD 80.74 di Sulawesi Selatan.

Dengan adanya tata Kelola yang baik diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat serta dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kab. Soppeng dalam hal pembangunan daerah setiap tahunnya. Disamping itu dengan mengetahui kondisi keuangan daerah, dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini **terkecuali** pada Indikator Indeks Penyerapan Anggaran dan Indeks Kondisi keuangan daerah, dimana kedua indikator tersebut tdk memenuhi capaian kinerja yang ditargetkan.

Beberapa hal yang menyebabkan tercapai dan tidak tercapainya target indikator kinerja sasaran ***Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah*** pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)

Indeks ini merupakan alat untuk mengukur sejauhmana konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran baik dari segi kesesuaian jumlah Pagu Program dan Nomenklatur Program antara dokumen RPJMD, RKPD, PPAS dan APBD.



Table. 3.3
Pengukuran Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

URAIAN/INDIKATOR	TOTAL PROGRAM	JUMLAH PROGRAM YANG SESUAI	SKOR RATA-RATA	RATA-RATA x BOBOT/5)
Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS	212	212	1	3.00
Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD	212	212	1	3.00
Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS	212	197	0.92	2.79
Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	212	193	0.91	2.73
JUMLAH			3.84	11.52
SKOR RATA-RATA			0.96	
INDEKS D1 SKOR RATA-RATA DIKALI BOBOT (BOBOT 12)				11.52

Target untuk indeks ini adalah sebesar 8.49 dan realisasi sebesar 11.52, Capaian menunjukkan angka 135.68%.

Walaupun target pada Dimensi 1 ini tercapai, namun terdapat beberapa hal yang mempengaruhi dalam hal pencapaian target kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021, antara lain :

- Sumber daya manusia yang kurang paham tentang proses perencanaan
- Komitmen dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.
- Penggunaan aplikasi yang terintegrasi sesuai tahapan mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan APBD.
- Kebijakan dari pemerintah pusat.
- Penyesuaian dengan kebijakan atau peraturan yang diterbitkan setelah dokumen perencanaan sebelumnya telah ditetapkan.
- Adanya perubahan kondisi daerah yang mengahruskan adanya penyesuaian Dokumen Penganggaran yang kurang sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Keterlambatan informasi tentang pagu defenitif transfer kedaerah tidak jarang diperoleh pemerintah daerah setelah proses perencanaan selesai dilaksanakan. Selain itu khusus DAK, menu setiap tahunnya berbeda-beda.

**b. Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)**

Indeks pengalokasian anggaran merupakan sejauh mana perhatian dan ketaatan pemerintah daerah untuk memenuhi beberapa amanat peraturan perundang-undangan (mandatory spending).

Target untuk indeks ini adalah sebesar 20 dan realisasi sebesar 20. Capaian menunjukkan angka 100%.

Tercapainya target pengalokasian anggaran belanja pada tahun 2021 adalah disebabkan beberapa hal :

- Besarnya perhatian pemerintah daerah untuk memenuhi mandatory spending adalah juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
- Ketaatan pemerintah pada Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pada tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp. 409.110.770.323 atau 31.34% dari Total APBD.
- Ketaatan pemerintah daerah terhadap besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pada Tahun 2021 alokasi Anggaran kesehatan sebesar Rp.323.275.739.004 atau 34.74% dari Total APBD (diluar gaji Non ASN)
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN). Pada tahun 2021 belanja infrastruktur sebesar Rp.422.867.204.643 atau 78.70% dari Total transfer ke daerah.
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pada tahun 2021 Alokasi ADD sebesar 13.06% dari dana Perimbangan.



c. Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)

Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah dalam hal memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi juga merupakan salah satu elemen kunci didalam good governance berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan publik.

Table. 3.4
Pengukuran Dimensi Transparansi

No	Komponen	Ketepatan waktu						Total Skor
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	Rentang Waktu (hari)	Sesuai/ Tidak sesuai	Nilai	Keter aksesan	
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	16 Agustus 2021	20 Agustus 2021	4	Sesuai	1	1	1
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	10 September 2021	15 September 2021	5	Sesuai	1	1	1
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafond Anggaran	10 September 2021	15 September 2021	5	Sesuai	1	1	1
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
5	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
6	Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
7	Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
8	Informasi Ringkasan DPA SKPD	17 Desember 2020	17 Desember 2020	1	Sesuai	1	1	1
9	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	17 Maret 2022	21 Maret 2022	4	Sesuai	1	1	1
10	Informasi Realisasi Belanja Daerah	17 Maret 2022	21 Maret 2022	4	Sesuai	1	1	1
11	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	17 Maret 2022	21 Maret 2022	4	Sesuai	1	1	1



No	Komponen	Ketepatan waktu						Total Skor
		Tanggal Penetapan	Tanggal Unggah	Rentang Waktu (hari)	Sesuai/ Tidak sesuai	Nilai	Keter aksesan	
12	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	31 Desember 2021	7 Januari 2022	7	Sesuai	1	1	1
13	Informasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	31 Desember 2021	31 Desember 2021	7 Januari 2022	Sesuai	1	1	1
14	Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	31 Desember 2021	31 Desember 2021	7 Januari 2022	Sesuai	1	1	1
15	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD	31 Desember 2021	31 Desember 2021	7 Januari 2022	Sesuai	1	1	1
16	Informasi Rencana Umum Pengadaan	31 Desember 2021	31 Desember 2021	7 Januari 2022	Sesuai	1	1	1
17	Informasi SK Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	8 Januari 2021	11 Januari 2021	3	Sesuai	1	1	1
18	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	30 Desember 2020	5 Januari 2021	5	Sesuai	0	1	0.5
19	Informasi Laporan Arus Kas	17 Maret 2022	21 Maret 2022	4	Sesuai	1	1	1
20	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	17 Maret 2022	21 Maret 2022	4	Sesuai	1	1	1
21	Informasi Neraca	17 Maret 2022	21 Maret 2022	4	Sesuai	1	1	1
22	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	17 Maret 2022	21 Maret 2022	4	Sesuai	1	1	1
23	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	17 Maret 2022	21 Maret 2022	4	Sesuai	1	1	1
24	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	29 Maret 2022	29 Maret 2022	1	Sesuai	1	1	1
25	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	17 Maret 2022	21 Maret 2022	8	Sesuai	1	1	1
26	Informasi Opini BPK	27 Mei 2021	7 Juni 2021	11	Sesuai	1	1	1
Jumlah Skor						25	26	25.5
Rata-Rata						0.96	1	0.9808
Bila kolom Nilai Terisi 1 dan Keteraksesan Terisi 0, maka jumlah skor adalah 0,05								

Catatan

Ketepatan waktu penyajian diberikan nilai 1 jika informasi/dokumen keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan resmi Pemda atau SIPD dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan

Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen keuangan daerah yang diukur tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi Pemda atau SIPD dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya



INDIKATOR	SKOR		SKOR RATA-RATA
Ketepatan waktu	25/26	0.96	$\frac{(0.96+1)}{2}$ = 0.9815
Keteraksesan	26/26	1	
INDEKS D3 SKOR RATA-RATA x BOBOT	0.9815 x 15		14.72

Target untuk indeks ini adalah sebesar 13.91 dan realisasi sebesar 14.72. Capaian menunjukan angka 105.82%.

Tercapainya target transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021 adalah didukung beberapa hal :

- Konsistensi dan aksesibilitas penyajian laporan keuangan
- Komitmen Manajemen
- Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja
- Adanya sarana informasi publik online (via website) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

d. Penyerapan anggaran (Dimensi 4)

Indeks penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu bentuk tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan Bersama, evaluasi anggaran, penetapan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Table. 3.5
Pengukuran Dimensi Penyerapan Anggaran

No	Indikator	Tahun 2021			
		Anggaran	Realisasi	Persentase Penyerapan Anggaran	Skor
1	Penyerapan anggaran belanja operasional	892,903,337,683	787,199,766,806	88.16	1
2	Penyerapan anggaran belanja modal	296,886,314,251	211,655,462,253	71.29	0
3	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga	2,113,580,939	629,389,500	29.78	0
4	Penyerapan anggaran belanja transfer	115,472,351,704	115,441,678,257	99.97	1
JUMLAH					2



catatan

Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% (>80%) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (<80%) maka skor diberikan angka 0

Skor Rata-Rata Indeks (D4) Tahun 2021	2/4	=	0.50
INDEKS D4 tahun 2021	0.50 x 20	=	10

Target untuk indeks ini adalah sebesar 15 dan realisasi sebesar 10 Capaian menunjukan angka 66.67%.

Tidak tercapainya target penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah disebabkan beberapa hal :

- Penyerapan anggaran belanja modal yang hanya 71.29% disebabkan karena tidak terealisasinya dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 35,353,816,750.- dan menyebabkan kegiatan fisik (belanja modal) yang sumber dananya dari program tersebut, tidak terealisasi atau tidak terlaksana. Sehingga tahapan kegiatan yang direncanakan pada APBD Tahun 2021 tidak sesuai. Disamping itu pemenuhan dokumen perjanjian program PEN termasuk izin pelampauan devisit baru terbit akhir desember tahun 2021.
- Rendahnya penyerapan anggaran belanja tidak terduga disebabkan karena Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, suatu pengembalian atas kelebihan atau kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sulit untuk merealisasikan sesuai yang dianggarkan. Hal ini karena Belanja Tidak Terduga hanya diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya kebencanaan yang tentunya hal tersebut sulit diprediksikan.

e. Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, yang terdiri atas kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solabilitas operasional, solabilitas jangka pendek, solabilitas jangka Panjang dan solabilitas layanan).



Table. 3.6
Pengukuran Kondisi Keuangan Daerah

No	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021*	SKOR
1	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	2.57	2.98	3.23	3.23	3.23
JUMLAH						3.23

Catatan

Indeks Rasio $i_n = \frac{(\text{Nilai actual pada penghitungan rasio} - \text{nilai minimal pada rasio tersebut})}{(\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal})}$

Indeks Rasio i_n diperoleh dari rata-rata indeks Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Data Indeks keuangan Daerah untuk tahun 2021 belum dapat diukur secara manual, karena harus menyandingkan dengan rasio masing-masing kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Nilai IPKD untuk tahun 2021 belum dapat ditentukan karena belum dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Target untuk indeks ini adalah sebesar 3.68 dan realisasi sebesar 3.23 (realisasi tahun 2020) Capaian menunjukkan angka 87.77%.

f. Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)

Pemberian Opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, system pengendalian internal dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Table. 3.7
Pengukuran Dimensi Opini BPK

No	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021*	SKOR
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	1
JUMLAH						1

catatan

Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun berturut-turut akan diberikan skor 1, dua tahun berturut-turut diberikan skor 2/3, dan satu tahun diberikan skor 1/3

Skor Rata-Rata Indeks (D6) Tahun 2021	3/3	=	1
INDEKS D6 tahun 2021	1 x 15	=	15



Target untuk indeks ini adalah sebesar 15 dan realisasi sebesar 15. Capaian menunjukkan angka 100%.

Adapun realisasi untuk indeks ini pada saat penyusunan LKj Tahun 2021 belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 oleh BPK masih dalam tahap pemeriksaan (Hasil Audit diprediksi pada Bulan Mei 2022). Realisasi diatas merupakan nilai sementara yang diperoleh dari realisasi tahun 2020.

Pencapaian opini WTP oleh BPK dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan
- Kelemahan system pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
- Kelemahan struktur pengendalian intern
- Kerugian daerah
- Potensi kerugian daerah
- Ketidakhematan
- Ketidakefektifan

2. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Adanya peningkatan kinerja sasaran dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja beberapa tahun lalu dengan capaian kinerja tahun ini. Perbandingan capaian per sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	9.59	9.74	5.79	11.51
	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	20	20	20	20
	Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	15	14.48	14.74	14.72
	Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	15	20	20	10
	Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	2.57	2.98	3.23	3.23
	Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	15	15	15	15



Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dan Tahun Sebelumnya pada sasaran
“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah”



Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata realisasi kinerja sasaran tidak mengalami penurunan kinerja. Rata-rata realisasi kinerja tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan. Kinerja ini dipertahankan dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi indikator tersebut antara lain :

- a. Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - c. Semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah
 - d. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
 - e. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi, pemerintah Pusat, Legislatif, stakeholder dan masyarakat.
3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian organisasi terhadap pencapaian target Renstra, maka perlu membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra organisasi. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TAHUN 2021	CAPAIAN %
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	Indeks (I)	8.64	7.76	91.40%
	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	Indeks (I)	20	20	100%
	Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	Indeks (I)	13.96	14.72	105.82%
	Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	Indeks (I)	15	10	66.66
	Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	Indeks (I)	3.75	*3.23	87.77
	Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	Indeks (I)	15	*15	100*

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng, maka beberapa indikator sasaran ini telah mencapai target jangka menengah daerah.

Hal ini karena tingginya loyalitas Pimpinan terhadap pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berbagai upaya maksimal telah dilakukan agar target indikator dalam pencapaian tatakelola keuangan daerah dapat tercapai.

Beberapa indikator tersebut antara lain: indeks pengalokasian anggaran, indeks transparansi pengelolaan keuangan dan indeks Opini BPK terhadap LKPD.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tidak memiliki Standar Nasional (SPM) yang dapat dibandingkan dengan pencapaian realisasi kinerja setiap tahunnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran 1 = Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah



⇔ Capaian Kinerja :

Indeks Keseuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, indeks Pengalokasian Anggaran, Indeks Transparansi, Indeks Penyerapan Anggaran, Indeks Kondisi Keuangan Daerah dan Indeks Opini BPK terdapa LKPD

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
2. Adanya target Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
3. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang mulai terintegrasi melalui aplikasi SIPD

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanan kegiatan yang bersumber dari dana transferyang besarannya tidak bersifat final.
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparatur pemeriksa
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Terlambatnya penyusunan Renstra SKPD
6. Seringnya terbit pemutakhiran terhadap peraturan yang baru saja mulai diterapkan

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Menentukan target kinerja yang terukur dan logis
2. Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan dokumen dengan baik
3. Melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk e-SAKIP.
4. Mengakomodir kebutuhan SDM berlatar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
5. Senantiasa menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan berikut pemutakhirannya.
6. Tetap mengoptimalkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran



⇌ Program/Kegiatan terkait :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan Sasaran I

Sasaran Strategik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	122.542.396.619	117.482.670.907	95.97	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.138.220.000	1.052.614.000	92.48	100%	100%	42.86
	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	21.450.000	18.582.800	86.63	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	27.290.000	23.109.300	84.68	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	3. Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	36.225.000	36.054.200	99,53	34 Dokumen	34 Dokumen	100
	4. Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	36.225.000	36.139.950	99,77	34 Dokumen	34 Dokumen	100
	5. Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.875.000	715.400	18.46	34 Dokumen	34 Dokumen	100
	6. Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.255.000	5.043.850	95.98	34 Dokumen	34 Dokumen	100
	7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	512.350.000	472.676.400	92.26	2 Rancangan	1	100
	8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	482.750.000	454.113.400	94.07	2 Rancangan	2 Rancangan	100
	9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12.800.000	6.178.700	48.27	1 SBU	1 SBU	100



Sasaran Strategik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	130.054.500	113.917.950	87.59	100%	100%	100
	1. Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	18.533.000	15.053.000	81.22	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	2. Penyiapan, pelaksanaan Pengendalian dan penerbitan Anggaran kas dan SPD	16.860.000	15.350.000	91.04	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15.950.000	13.650.000	85.58	9 SKPD	9 SKPD	100
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.290.000	17.965.100	77.14	6 Laporan	6 Laporan	100
	5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	23.255.000	21.857.250	93.99	6 Berita Acara	6 Berita Acara	100
	6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.166.500	30.042.600	93.40	100%	100%	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	283.175.000	245.071.200	86.54	100%	100%	100
	1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18.400.000	17.632.500	95.83	2 Laporan	2 Laporan	100
	2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	43.125.000	41.877.400	97.11	34 Dokumen	34 Dokumen	100



Sasaran Strategik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
	3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24.325.000	23.843.650	98.02	612 Dokumen	612 Dokumen	100
	4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.350.000	101.094.050	89.19	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	40.175.000	39.878.900	99.26	2 Rancangan	2 Rancangan	100
	6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	43.800.000	20.744.700	47.36	4 Kali dan 100%	4 Kali dan 100%	2 kali dan 50%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120.990.947.119	116.071.067.757	100	100%	100%	100
	1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1,471,926,699	0	0	100%	0	100
	2) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.933.087.777	0	0	100%	0	100
	3) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	112.897.797.112	112.867.123.665	99.97	100%	100%	100
	4) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.113.580.939	629.389.500	29.78	100%	10%	10
	5) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.574.554.592	2.574.554.592	100	100%	100%	100
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.120.135.000	785.796.052	70.15	100%	100%	100
	Pengelolaan Barang	1.120.135.000	785.796.052	70.15	100%	100%	100



Sasaran Strategik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
	Milik Daerah						
	1. Penyusunan Standar Harga	256.650.000	197.120.000	76.80	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	2. Pengamanan Barang Milik Daerah	365.570.000	178.855.700	48.93	50 Aset Pemda & 100%	40 Aset Pemda & 80%	100
	3. Penilaian Barang Milik Daerah	104.800.000	62.394.100	59.54	2 Dokumen	2 Dokumen	59.54
	4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70.115.000	44.277.500	63.15	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	323.000.000	303.148.752	93.85	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.11
Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran I
“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tingkat Efisiensi	Ket.
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan daerah	1. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1) 2. Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2) 3. Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3) 4. Penyerapan anggaran (Dimensi 4) 5. Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5) 6. Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	123.662.531.619	118.268.466.959	95.64	99,32	1,03	Efisien



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran Pertama Meningkatnya Tata Kelola Keuangan daerah, terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,03% dari total belanja sasaran. Angka Efisiensi menunjukkan adanya keseimbangan antara tingkat kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran. Untuk mencapai kinerja sebesar 99.32% terdapat efisiensi sebesar 1.03 pada penyerapan anggarannya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Pertama Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, terdiri atas 2 Program, 4 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Semua Sub kegiatan yang dimaksud menunjang keberhasilan pencapaian sasaran I, Meningkatnya tata Kelola keuangan daerah.

SASARAN II

MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pada *sasaran meningkatnya Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah* bila dibandingkan dengan target, maka tercapai realisasi dengan persentase capaian sebesar 100% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya.

Tabel 3.12

Perbandingan target dan realisasi sasaran II Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	- Persentase Peningkatan Asli Daerah	Persentase	1%	2%	200%
		- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Predikat	Baik	Baik	100%



Rata-rata Capaian	150%
-------------------	------

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tentunya membawa dampak besar bagi pembangunan daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021. Beberapa manfaat tersebut antara lain bahwa meningkatnya kesejahteraan rakyat, membantu mengurangi pengangguran melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatkan efektivitas perekonomian daerah, mempertahankan keseimbangan perekonomian daerah, khususnya ditengah Pandemi Covid-19 serta asumsi pendapatan dapat menjadi landasan dalam melaksanakan penganggaran yang akan direncanakan selanjutnya.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Pendapatan Daerah** pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Peningkatan Asli Daerah

Adanya peningkatan realisasi penerimaan setiap jenis Pajak pada tahun 2021, antara lain Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Walaupun beberapa jenis pajak tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan pemerintah dalam hal pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran akibat pandemic covid-19. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

Table. 3.13

Pengukuran Persentase Pendapatan Asli Daerah

No	INDIKATOR	REALISASI PAD TAHUN	
		2020	2021
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah	Rp. 151.857.742.474.87	Rp. 155.470.054.144.9
Rumus		PAD Tahun n- PAD TAHUN lalu/ PAD Tahun lalu	
Nilai Persentase PAD		$\frac{155.470.054.144 - 151.875.742.474}{151.857.742.474} \times 100\%$	
		0.02	

Target untuk indeks ini adalah sebesar 1% dan realisasi sebesar 2% Capaian menunjukan angka 200%.



Pencapaian target persentase Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Adanya reward and punishment
- Adanya beberapa potensi pajak daerah
- Penyederhanaan proses bisnis
- Adopsi teknologi tepat guna
- Laik penyebaran informasi

b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selaku unit penyelenggara pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini merupakan langkah rutin untuk menjaga dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan serta untuk membangun kepercayaan terhadap penyelenggara pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan.

Harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan adalah mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pelayanan Pajak Daerah dan retribusi Daerah berkewajiban memberikan pelayanan prima sesuai dengan janji dan standar pelayanan, serta menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan SKP yang memenuhi kenyamanan dan keinginan pengguna layanan.

Table. 3.14
Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	5,324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK



Target untuk indikator ini adalah predikat BAIK dan realisasi dengan nilai 83,78 atau predikat BAIK. Capaian menunjukkan angka 100%.

Pencapaian target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Adanya perbaikan mutu layanan
- Adanya Penyederhanaan proses bisnis
- Kewajaran biaya/tarif penanganan pengaduan
- Tanpa gratifikasi
- Adanya aplikasi yang memudahkan layanan perpajakan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Adanya peningkatan kinerja sasaran dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja beberapa tahun lalu dengan capaian kinerja tahun ini. Perbandingan capaian per sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun	
		2020	2021
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Asli Daerah	1%	2%
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	BAIK	BAIK

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja sasaran tidak mengalami penurunan kinerja. Terlihat bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah mampu mempertahankan kinerjanya hingga pada Tahun 2021 untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan untuk indikator persentase peningkatan PAD terdapat kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2%. Kinerja ini dipertahankan dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi indikator tersebut antara lain :



- a. Peningkatan layanan
 - b. Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - c. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
 - d. Adanya reward and puishment
 - e. Adanya aplikasi yang memudahkan layanan
 - f. Adanya aturan yang mengikat warga untuk membayar pajak
3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

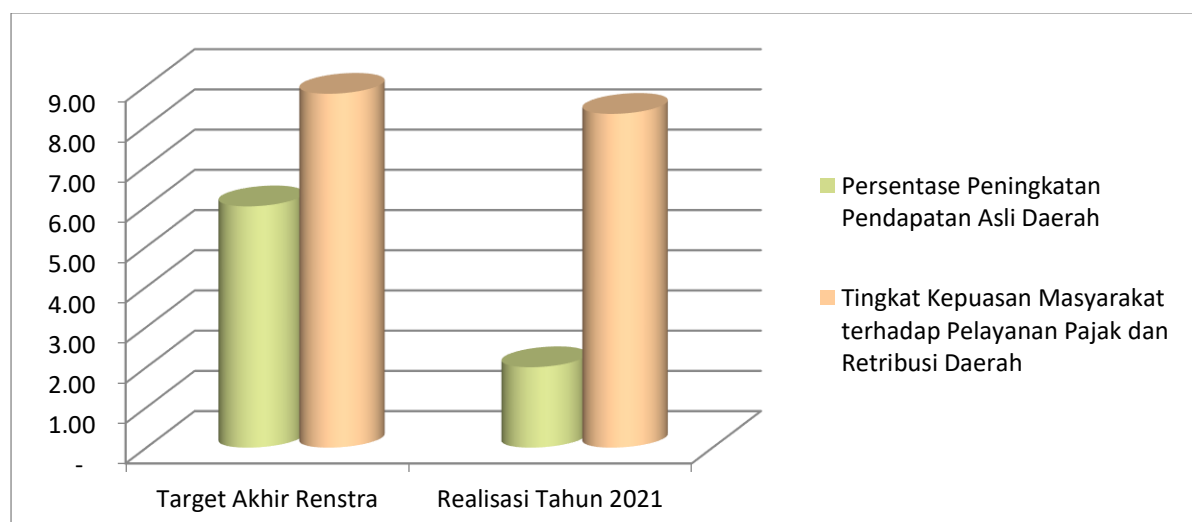
Untuk mengukur sejauh mana pencapaian organisasi terhadap pencapaian target Renstra, maka perlu membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Renstra organisasi. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun ini dengan Target Renstra “Meningkatnya Pendapatan Daerah”

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TAHUN 2021	CAPAIAN %
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	6%	2%	33.33%
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Predikat	BAIK	BAIK (83)	100.00%

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Tahun ini dengan Target Renstra





Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya pendapatan daerah pada tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng, maka indikator sasaran ini ada yang telah mencapai target jangka menengah daerah yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dan indikator yang belum memenuhi target akhir periode RPJMD adalah Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian target yang cukup besar ditunjang oleh tingginya loyalitas Pimpinan terhadap pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan perhatian yang besar dalam mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi pada RPJMD Bupati Tahun 2021-2026

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tidak memiliki Standar Nasional (SPM) yang dapat dibandingkan dengan pencapaian realisasi kinerja setiap tahunnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran 2 = Meningkatnya Pendapatan Daerah

⇔ Capaian Kinerja :

Meningkatnya pendapatan asli daerah

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Peningkatan layanan
2. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
3. Adanya reward and punishment
4. Adanya aplikasi yang memudahkan layanan
5. Adanya aturan yang mengikat warga untuk membayar pajak

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah
2. kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang Pajak daerah



4. lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
5. kelemahan kualitas SDM aparatur
6. Potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Rokok.
7. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
8. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas proses pelayanan pendaftaran khususnya dalam hal Entry Data, meningkatkan level verifikasi dan penambahan tenaga petugas pendaftaran PBB.
2. Melakukan integrasi data dengan pihak-pihak terkait untuk memudahkan proses entry data.
3. Melakukan pembekalan budaya pelayanan prima kepada Loker Layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Penyampaian himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan bilamana ada ketidaksesuaian data pada SPPT yang terbit untuk dimutakhirkan.
5. Menambah personil pada pengelolaan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan

b. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

⇔ Capaian Kinerja :

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan retribusi Daerah

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan
2. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang terintegrasi dengan baik dalam pelayanan Pajak
3. Adanya peraturan yang mengikat tentang Pajak dan retribusi daerah



4. Penentuan target Pajak dan retribusi yang tepat

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pelayanan pajak
2. Adanya pandemic covid-19 yang membatasi wajib pajak untuk berinteraksi secara langsung pada loket pembayaran
3. Masih terbatasnya pembayaran pajak via online

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Tetap memperhatikan protocol Kesehatan pada pelayanan pajak secara langsung
2. Mengakomodir kebutuhan SDM berlatar belakang pendidikan pajak daerah
3. Mengembangkan layanan pajak berbasis online
4. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
5. Menyusun perda baru untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
6. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan dilahirkannya perda baru yang memayungi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

Program/Kegiatan terkait :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran II
“Meningkatnya Pendapatan Daerah”

Sasaran Stratejik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
Meningkatnya Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.597.854.497	1.491.112.058	93.32	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.597.854.497	1.491.112.058	93.32	100	100	100
	1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	395.849.497	324.933.958	82.09	8 kecamatan	8 kecamatan	100



Sasaran Strategik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	69.000.000	66.493.400	96.37	1 dokumen	1 dokumen	100
	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	279.500.000	277.832.000	99.40	2 jenis	2 jenis	100
	4. Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	369.975.000	368.487.200	99.60	2 dokumen	2 dokumen	100
	5. Penagihan Pajak Daerah	436.580.000	429.515.500	98.38	20300 SPPT	20300 SPPT	100
	6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	46.200.000	23.100.000	50	1 Dokumen	1 dokumen	100
	7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	750.000	750.000	100	100	100	100

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah;

Tabel 3.18
Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran II
“Meningkatnya Pendapatan Daerah”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)	Ket.
Meningkatnya Pendapatan daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1.597.854.497	1.491.112.058	93.32	150	1.60	Efisien
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak dan retribusi daerah Kab. Soppeng						

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja sasaran kedua Meningkatnya Pendapatan Daerah, terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,60% dari total penyerapan anggaran sasaran. Efisiensi diperoleh dari maksimalnya penagihan



pajak baik oleh aparat maupun pembantu kolektor serta adanya layanan pembayaran pajak online yang mulai diterapkan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Pertama Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, terdiri atas 1 Program, 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

SASARAN III

MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR DAN KUALITAS LAYANAN PENYELENGGARAAN URUSAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama dan membandingkan antara target dan realisasi.

Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran ***Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng*** dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan target dan realisasi sasaran III Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berperdikat BAIK	Persentase	100	100	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Indeks	77-79	84	106.32%
Rata-Rata Capaian						103.16



Beberapa hal yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja sasaran ***Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng*** pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK

Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN dalam kurun waktu penilaian. Sasaran Kinerja Pegawai disusun sebagai suatu alat ataupun sarana untuk penilaian prestasi kerja ASN yang secara sistematis dilakukan oleh pejabat penilai SKP itu sendiri dan perilaku kerja pegawai.

Table. 3.20
Pengukuran Persentase Aparatur yang mendapatkan nilai SKP “BAIK”

No	Indikator	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP ‘BAIK’	Jumlah ASN Tahun 201
1	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK	100 ASN	100 ASN
Jumlah ASN dengan Nilai SKPD ‘BAIK’ / Jumlah ASN dikali 100%			100/100 x 100%
Nilai			100%

Target untuk indikator ini adalah sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% Capaian menunjukkan angka 100%.

Pencapaian target persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- Adanya reward and punishment
- Adanya pengukuran kinerja yang logis dan terukur
- Adanya tambahan penghasilan ASN

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selaku unit penyelenggara penunjang urusan keuangan, dalam hal ini mengukur sejauhmana kualitas mutu pelayanan terhadap para stakeholder pengelolaan keuangan daerah.

Table. 3.21

Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

No.	UNSUR PELAYANAN				
U1	Persyaratan			3,233	B
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur			3,167	B
U3	Waktu Penyelesaian			3,133	B
U4	Biaya/Tarif			4,000	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan			3,300	B
U6	Kompetensi Pelaksana			3,400	B
U7	Perilaku Pelaksana			3,467	B
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan			3,333	B
U9	Sarana dan prasarana			3,367	B
				84,44	

Target untuk indikator ini adalah predikat BAIK dan realisasi dengan nilai 84,44 atau predikat BAIK. Capaian menunjukkan angka 106.89%.

Pencapaian target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- Adanya perbaikan mutu layanan
- Adanya Penyederhanaan proses bisnis
- Tanpa gratifikasi
- Adanya aplikasi yang memudahkan layanan dalam pengelolaan keuangan daerah
- Koordinasi yang baik

2. **Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng.**



Adanya peningkatan kinerja sasaran dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja beberapa tahun lalu dengan capaian kinerja tahun ini. Perbandingan capaian per sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran III Tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun	
		2020	2021
<i>Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng</i>	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	0	84.44

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata realisasi kinerja sasaran tidak mengalami penurunan kinerja. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng mampu mempertahankan kinerja pada indikator persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP “BAIK” hingga pada Tahun 2021. Sedangkan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPKPD, pengukurannya baru dilakukan pada tahun 2021 dan menunjukkan predikat BAIK sesuai kriteria nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Kinerja ini dipertahankan dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi indikator tersebut antara lain :

- Peningkatan layanan
- Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- Tingginya rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi
- Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
- Adanya reward and punishment
- Adanya aplikasi yang memudahkan layanan
- Ketaatan terhadap aturan yang berlaku berikut pemutakhirannya.



3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian organisasi terhadap pencapaian target Renstra, maka perlu membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Renstra organisasi. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran III Tahun ini dengan Target Renstra

“ Meningkatkan Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng ”

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TAHUN 2021	CAPAIAN %
Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berperingkat BAIK	Persentase	100%	100%	100.00%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Indeks	88.31	84.44	95.61%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng pada tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPKPD Kabupaten Soppeng, maka indikator sasaran ini ada yang telah mencapai target jangka menengah daerah yaitu Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berperingkat BAIK, dan indikator yang belum memenuhi target akhir periode Renstra adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng yakni baru mencapai 95.61%.

Pencapaian target yang cukup besar ditunjang oleh tingginya loyalitas Pimpinan terhadap pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan perhatian yang besar dalam mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi pada RPJMD Bupati Tahun 2021-2026



4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)**

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tidak memiliki Standar Nasional (SPM) yang dapat dibandingkan dengan pencapaian realisasi kinerja setiap tahunnya.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Sasaran 3 = Meningkatkan Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

⇔ Capaian Kinerja :

Meningkatnya kapasitas aparatur

⇔ Penyebab keberhasilan/ kegagalan

1. Peningkatan layanan
2. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
3. Adanya reward and puishment
4. Adanya aplikasi yang meudahkan layanan
5. Sarana dan prasarana yang memadai

⇔ Kendala – kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah
2. kelemahan kualitas SDM aparatur
3. Integrasi aplikasi belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh
4. Tingkat kedisiplinan aparatur yang masih perlu ditingkatkan
5. Adanya mutasi aparatur yang menuntut perlu adanya adaptasi dan bimbingan terkait tugas pokok dan fungsi aparatur

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersdia
2. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana layanan
3. Menerapkan reward and punishment



⇌ Program/Kegiatan terkait :

Tabel 3.24

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Sasaran III
“Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng”

asasan Strategik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggara an urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	20.258.687.302	18.721.578.633	92.41	100%	100%	100%
	Perencanaan, Pengangguran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.860.000	44.953.700	98.02	100%	100%	100%
	1. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7.795.900	7.187.900	92.21	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.955.000	12.919.650	99.73	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Perubahan SKPD	13.310.000	13.200.000	99.17	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.800.000	11.646.150	98.70	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	10.972.957.440	9.999.693.875	91.13	100%	100%	100%
	5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.851.654.440	9.881.059.275	91.06	100%	100%	100%
	6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.840.000	105.178.000	97.53	1200 SPM	1200 SPM	69.00
	7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.463.000	13.458.600	99.95	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11.028.828	11.028.828	100	100%	100%	100%
	8. Perencanaan Pengelolaan retribusi Daerah	11.028.828	11.028.828	100	2 Obyek Retribusi	2 Obyek Retribusi	100%



asasan Strategik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.200.000	37.704.050	96.18	100%	100%	100%
	9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.200.000	37.704.050	96.18	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.317.138.970	1.240.844.650	94.21	100%	100%	100%
	10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.523.500	12.095.500	77.92	2 Jenis	2 Jenis	100%
	11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.140.000	202.710.00	98.82	3 Paket	3 Paket	100%
	12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	335.632.500	288.230.100	85.88	3 Jenis	3 Jenis	100%
	13. Penyediaan Bahan/Material	288.699.370	267.915.250	92.80	2 Paket	2 Paket	100%
	14. Fasilitas Kunjungan Tamu	24.925.000	24.900.000	99.90	600 Orang	1095 Orang	100%
	15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.218.600	444.993.800	99.50	280 kali	380 kali	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	485.400.000	471.252.000	97.09	100%	100%	100%
	16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	137.193.000	91.46	6 unit	6 unit	100%
	17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.400.000	334.059.000	99.60	28 Unit	28 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.096.992.394	6.673.706.061	94.04	100%	100%	100%
	18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	1.233.000	12.33	86 kali	86 kali	100%
	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	6.567.192.394	6.159.323.061	93.79	36 kali	36 kali	100%



asasan Strategik	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target Fisik	Realisasi Fisik	%
	20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.800.000	513.150.000	98.72	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.109.670	242.395.469	83.55	100%	100%	100%
	21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	167.013.670	134.680.469	80.64	296 unit	296 unit	100%
	22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.150.000	10.550.000	86.83	39 kali	39 kali	100%
	23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.946.000	97.165.000	87.58	320 M2	320 M2	100%

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan;

Tabel 3.25

Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran III

“Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Ket.
Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	1. Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berpredikat BAIK	20.258.687.302	18.721.578.633	92.41	103.16	1.11	Efisien
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng						

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran ketiga Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan, terdapat efisiensi



anggaran sebesar 1,11% dari total capaian belanja sasaran terhadap persentase capaian kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ketiga *Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng*, terdiri atas 1 Program, 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

B. Akuntabilitas Keuangan.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk tahun 2021 sebesar Rp. 145.519.073.418,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.481.157.650,- Dengan jumlah 4 (empat) Program 14 (empat belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan.

Dibandingkan dengan capaian keuangan tahun anggaran 2020 sebesar 92,33%, maka dalam hal realisasi keuangan terdapat peningkatan kinerja ditahun 2021 yakni sebesar 95.16%.

C. Rata-Rata Capaian Sasaran

Berdasarkan kerangka perhitungan indikator kinerja maka dapat diuraikan rata-rata capaian dari Kedua sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.26
Rata-Rata Capaian Sasaran Rencana Strategik SKPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	135.68%
	Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	100.00%
	Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	105.82%
	Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	66.67%
	Indeks Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5)	87.77%
	Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	100%



Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	200%
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng	100%
Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran		95,44%

Total capaian sasaran dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng bila dijumlahkan sebesar 1.095,94 atau bila dirata-ratakan sebesar 109,59%.

Namun untuk dapat mengukur kinerja yang sebenarnya (real) maka setiap capaian sasaran yang melebihi (over) target **dimaksimalkan pada angka 100%**. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja yang over target tidak menutupi kekurangan pencapaian target indikator lainnya yang tidak memenuhi target capaian.

Sehingga di peroleh angka rata-rata capaian sasaran sebesar **95.44% dengan kategori (sangat tinggi)**.

D. Reward and Punishment

Pelaksanaan Reward and Punishment pada Badan Pengelolaan Keunagan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021 telah dilaksanakan dengan memberikan penghargaan kepada 35 orang baik dari Pihak eksternal (wajib Pajak, Badan/Perorangan, Kolektor, Pembantu kolektor, Mitra Penyetoran) dan Pihak Internal (Aparatur Sipil Negara lingkup BPKPD) atas dedikasi dan prestasi yang dicapai selama tahun 2021.

Reward yang diberikan dalam bentuk Piagam penghargaan dengan berdasarkan pada SK Bupati Soppeng Nomor 17/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak, Badan/Perorangan, Kolektor, Pembantu Kolektor, Mitra Penyetoran



dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (SK terlampir)

Reward pada wajib pajak adalah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah pada tahun-tahun selanjutnya dengan jalan memberikan penghargaan pada pihak-pihak yang telah berkontribusi besar pada pendapatan asli daerah.

Sedangkan reward pada ASN berupa penghargaan terhadap ASN, (1) yang mampu menyelesaikan Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik kinerja terbaik berdasarkan pengukuran kinerjanya serta, (2) reward terhadap ASN terdisiplin yang diukur melalui voting dengan beberapa nominasi yang telah diusulkan sebelumnya. Reward ASN diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pegawai agar dapat bekerja lebih maksimal dalam pencapaian target Perjanjian Kinerja serta mendorong semangat kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara khususnya ketepatan waktu jam kerja. (piagam terlampir)



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 ini disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga target Kinerja ***“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah, Meningkatnya Pendapatan Daerah, dan Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng”*** dapat dimaksimalkan pencapaiannya. Pencapaian ini didukung dengan kinerja Fisik sebesar 96.31% dan Pencapaian Realisasi Keuangan sebesar 95.16%. Berdasarkan kerangka pengukuran indikator dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata tingkat pencapaian realisasi kinerja untuk ketiga sasaran tersebut adalah **95.44%** dengan kategori pencapaian ***“sangat tinggi”***.

Terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada Bab-Bab sebelumnya telah diimplementasikan upaya antara lain :

1. mengoptimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan dan pemanggaran serta monitoring dan evaluasi dalam setiap pengambilan keputusan
2. memberikan reward and punishment baik lingkup eksternal maupun lingkup internal
3. menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran rencana akasi dan pengukuran kinerja untuk menetapkan target kinerja selanjutnya
4. senantiasa melakukan perbaikan maksimal melalui evaluasi interbal secara berkala

Saran untuk peningkatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Tetap mengupayakan melaksanakan reward and punishment untuk lingkup eksternal dan lingkup internal Bdan Pengelolaan keuangan yang secara nyata telah bermanfaat



dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.

2. Mengoptimalkan dan menggali Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung proses pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Sistem Pengendalian Interen dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan.
4. Membuat Analisis Resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.
5. Pengukuran Tata Kelola keuangan yang terukur dan logis melalui pengukuran setiap dimensi, dapat dijadikan pertimbangan dan data pembandingan dalam pengambilan kebijakan terkait bidang keuangan pada tahun-tahun berikutnya
6. Mencermati hasil pengukuran kinerja pertriwulan pada tahun 2021 agar kekurangan pencapaian target fisik dan keuangan dapat dimaksimalkan pada tahun berikutnya

Diharapkan dengan adanya laporan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng dapat melengkapi dokumen SAKIP SKPD serta menjadi bahan pertanggungjawaban terhadap kinerja sasaran SKPD dan sebagai bagian dari bentuk dukungan pencapaian target RPJMD.

Watansoppeng, 29 Maret 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**

Drs. H. LIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PIAGAM PENGHARGAAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PORSI NOMINAL
TRANSAKSI PENDAPATAN MELALUI QRIS
TERBANYAK

APRESIASI TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH SE-SULAWESI SELATAN

Makassar, 24 November 2021

TERBAIK 2
Diberikan Kepada
Kabupaten Soppeng

Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan

Causa Iman Karana

DOKUMENTASI INOVASI (GERAKAN SEPEKAN) TAHUN 2021

